

# **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN SIKUMANA KOTA KUPANG**

Hendrik Toda<sup>1</sup>

**hendrik.toda2012@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu prioritas pemerintah Kota Kupang juga memiliki sisi negatif dalam implementasinya. Sebab Kelurahan Sikumana Kota Kupang adalah salah satu dari 10 kelurahan di Kota Kupang yang mendapat rapor merah dari pemerintah Kota Kupang. Karena Kelurahan Sikumana Kota Kupang menjadi penunggak dana terbesar saat penelitian ini dilaksanakan dengan jumlah dana tunggakan sebesar Rp. 310.308 000 dari total dana Rp. 500 juta yang dihibahkan. Pengembalian dana bergulir program ini oleh masyarakat penerima bantuan sering terjadi keterlambatan, program ini membantu masyarakat dalam hal dana tetapi waktu pengembalian dana yang hanya satu tahun dirasa terlalu singkat, dana yang diberikan dirasa belum dirasa mencukupi karena dana yang diberikan belum sesuai dengan besaran usaha yang diusahakan oleh masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat karena kurangnya sosialisasi, tidak semua masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah menerima dana program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kurangnya pengawasan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terjadi banyak kesalahan dalam perekutan calon penerima bantuan, total penerima dana PEM di kelurahan di sebanyak 46 warga, sementara warga yang belum mengembalikan dana tersebut sebanyak 26 orang dengan Jumlah dananya adalah sebesar Rp. 310.308, carut marutnya administrasi sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai proses pengembalian dana oleh masyarakat, sumberdaya yang kurang, selain itu juga koordinasi yang kurang baik antara pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lurah. Penelitian ini dapat digunakan senagai behan referensi bagi Permerintah Kota Kupang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang serta secara khusus penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang.

**Kata Kunci: Kebijakan, Pemberdayaan, Masyarakat, Ekonomi**

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan perekonomian merupakan bagian dari suatu usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah. Usaha tersebut dilaksanakan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan-kebijakan pembangunan tersebut

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana

pada dasarnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat Indonesia baik secara menyeluruh maupun suatu daerah tertentu dengan berdasarkan kepada skala prioritas pembangunan yang tujuan utamanya adalah terciptanya *sense of belonging* dan *sense of responsibility* dalam proses pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pada masa orde baru, pembangunan di Indonesia direncanakan secara terpusat oleh Bappenas yang dijabarkan dalam Repelita. Akibatnya perencanaan pembangunan sepenuhnya diatur dan diawasi oleh pemerintah pusat sebagai rencana pembangunan nasional, di mana daerah menerima “alokasi” anggaran dan program yang sebenarnya merupakan program nasional yang ditempatkan di daerah tertentu, konsekuensinya pembangunan yang terjadi di daerah bukanlah pembangunan milik daerah melainkan sebagai pembangunan nasional yang merupakan “petunjuk” dan “arah” yang berdasarkan pada rasa belas kasihan dan *paternalism* dari Bappenas dan Departemen Dalam Negeri (Kuncoro, 2003:3).

Secara umum upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat adalah adanya kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan rentan terhadap kemiskinan.

Memasuki era reformasi terutama saat memasuki era otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001, dinamika pembangunan mulai berubah, pembangunan dianggap tidak dapat terlepas dari pemahaman terhadap konsep pembangunan yang bersifat terbuka yaitu pendekatan “membangun di daerah” menuju orientasi “membangun daerah” yang artinya proses pembangunan yang inisiatifnya memang muncul dari daerah atau didominasi oleh aspirasi daerah sendiri. Tujuannya adalah untuk

memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Pembangunan dipandang sebagai suatu proses transformasi pada dasarnya akan membawa perubahan dalam proses alokasi sumber-sumber ekonomi, proses distribusi manfaat dan proses akumulasi yang membawa pada pengingkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan.

Dengan memahami pembangunan sebagai perubahan struktur maka pemilihan strategi kebijakan yang tepat merupakan langkah awal yang baik untuk mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum (masyarakat). Indonesia sebagai Negara berkembang terus mengupayakan pembangunan nasional. Paradigma pembangunan harus berpusat pada manusia (*people centered development*) yang memandang manusia atau masyarakat sebagai pemeran utama dalam pembangunan dengan cara mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki masyarakat atau disebut dengan pemberdayaan.

Konsep pemberdayaan dipandang sebagai aliran *post-modernism* karena muncul pada paruh abad ke-20, munculnya konsep pemberdayaan merupakan akibat dari aksi dan reaksi terhadap alam pikiran, tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang di suatu negara, pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada tingkat individu dan sosial. (Surjono, Nugroho, 2007:25). Pemberdayaan telah menjadi sesuatu yang *new mainstream* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di masyarakat, dalam konteks, pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah suatu sumberdaya pembangunan yang perlu untuk dikembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat itu sendiri,

pemberdayaan juga terjadi sebagai akibat dari sebuah proses, sebuah mekanisme dimana orang, organisasi dan masyarakat mendapatkan penguasaan atas urusan mereka sendiri (Strzelecka *et al*, 2017).

Di Indonesia, salah satu upaya untuk meningkatkan derajat ekonomi masyarakat adalah dengan menciptakan kebijakan-kebijakan pemberdayaan masyarakat atau publik yang dapat memperkuat potensi yang ada di masyarakat (publik). Menurut Islamy (2004:33-34), kebijakan publik merupakan suatu patokan bermasyarakat dan bernegara bagi publik dan dunia usaha. Tanpa kebijakan publik, maka negara akan berjalan tanpa arah, layaknya dunia binatang di hutan rimba. Sebuah kebijakan dibuat oleh regulator (terkecuali Undang Undang harus atas persetujuan DPR), dalam hal ini pemerintah, untuk supaya publik memperoleh pelayanan yang baik dan dunia usaha dapat mengembangkan usahanya untuk dapat menyumbang pajak kepada negara secara optimal dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin bagi masyarakat. Salah satu dari kebijakan-kebijakan tersebut adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara praktis berarti upaya penggerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi lokal ekonomi rakyat yang akan output dari kebijakan tersebut berakibat pada peningkatan produktivitas masyarakat sehingga sumber daya manusia maupun sumber daya alam sekitar, keberadaan rakyat dapat pula ditingkatkan produktivitasnya. Pada akhirnya rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat ekonominya.

Mengutip pendapat Al-Dajani *et al* (2013) dalam kerangka konseptual empiris, peningkatan kesadaran dan pengetahuan

merupakan hasil penting dari suatu siklus pemberdayaan, secara independen atau kolektif, hasil pemberdayaan mempengaruhi perkembangan masing-masing individu di masyarakat untuk memperkuat dan mengusahakan ekonominya sendiri. Misalnya, dengan tingkat kemiskinan yang berkurang maka dapat meningkatkan identitas diri dan kepemimpinan perempuan dalam masyarakat, meningkatnya keterampilan dalam pengambilan keputusan dan potensi pembentukan ekonomi. Demikian pula, peningkatan kesadaran dan pengetahuan jelas akan mempengaruhi akuntabilitas dan tanggung jawab, pengambilan keputusan dan potensi kepemimpinan. Selanjutnya, secara independen atau kolektif, hasil pemberdayaan ini pada gilirannya akan mempengaruhi motivasi *entrepreneurship individual* yang merupakan titik awal kerangka kerja yang diusulkan dalam program ini.

Dengan adanya otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih berorientasi kepada perwujudan kemandirian daerah, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan termasuk fungsi pemberdayaan masyarakat. Dalam era otonomi daerah, fungsi pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu program fokus perhatian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semangat desentralisasi menghendaki pemberian pelayanan terbaik melalui kebijakan pemberdayaan agar lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga secara otomatis implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan hasil atau dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat terutama dalam hal ekonomi.

Suatu kebijakan publik harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan dan suatu program kebijakan akan terlihat nyata saat diterapkan

atau diimplementasikan di lapangan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan setelah penetapan Undang-undang (UU). Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran maupun sebagai suatu dampak. Implementasi diartikan dalam konteks keluaran atau sejauh mana tujuan-tujuan yang direncanakan mendapat dukungan, seperti tingkat pengeluaran belanja bagi suatu program.

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini juga sedang giat diimplementasikan oleh pemerintah Kota Kupang. Kota Kupang merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan luas daerah 180,27 km<sup>2</sup> dan penduduk berjumlah 390,877 jiwa dan telah mengalami pertambahan jumlah penduduk yang cukup besar selama 7 tahun berlangsung yaitu bertambah 100.000 jiwa (BPS 2019). Fenomena pertambahan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari daerah lain yang berada di NTT. Sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang telah menjadi sasaran masuknya penduduk dari daerah lainnya untuk melakukan aktivitas baik dari aspek ekonomi, pendidikan dan aktivitas lainnya namun peta persebaran jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kota Kupang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai untuk menyerap ketersediaan tenaga kerja sehingga menjadi pegawai negeri sipil merupakan salah satu dari sedikit pilihan yang umumnya dipilih oleh masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.

Mengingat bahwa Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi NTT dan sebagai pusat pemerintahan di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat dikatakan sedang berkembang maka pemerintah Kota Kupang

memberikan perhatian yang lebih dalam hal ekonomi dengan membidani suatu kebijakan pemberian dana bergulir tanpa bunga kepada masyarakat Kota Kupang yaitu program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengacu kepada Keputusan Walikota Kupang No. 112D/KEP/HK/2017 tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Walikota Kupang No.15A/Kep/HK/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat berada dibawah kendali pemerintah Kota Kupang dan secara teknis dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang beserta OPD teknis terkait lainnya. Sedangkan operasionalisasi pengeloaannya diserahkan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat di masing-masing kelurahan. Sasaran dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat Kota Kupang adalah usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan.

Program ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Kupang dengan memberikan dana bergulir tanpa bunga kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Dana pemberdayaan berasal dari APBD daerah dan diberi sesuai kemampuan usaha masyarakat dalam bentuk hibah kepada LPM di masing-masing kelurahan dan digulirkan kepada masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki struktur ekonomi dan pemberian modal usaha ekonomi produktif yang berskala kecil sesuai potensi ditingkat kelurahan dengan sasaran adalah masyarakat yang memiliki usaha perorangan berskala kecil yang telah berjalan. Usaha untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah merupakan suatu cara untuk meningkatkan perekonomian daerah bahkan perekonomian nasional, hal ini juga merupakan suatu cara untuk

mengangkat derajat masyarakat kecil dari lingkaran kemiskinan dengan tingkat konsumsi yang pasti dan tidak berfluktuasi, dapat mengelola resiko secara mandiri, terdapat kesempatan untuk mebmangun, memiliki dan mengelola asset, penguatan kapasitas pendapatan serta untuk hidup yang lebih baik.

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dilaksanakannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk nyata baik berupa program maupun keputusan-keputusan tentang bagaimana cara mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Setiap kebijakan publik mempunyai tujuan yang baik serta berorientasi pada pencapaian tujuan dan pemecahan masalah. realita menunjukkan bahwa suatu implementasi kebijakan sejak awal melibatkan suatu proses yang rasional dan emosional yang teramat kompleks melalui mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui sakuran birokrasi, birokrasi ini harus dapat berjalan efektif, artinya harus menjalankan dan melaksanakan rumusan-rumusan kebijakan publik (*public policies*) dengan baik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat adalah pelaku utama pembangunan sedangkan pemerintah (birokrasi) berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan iklim yang menunjang.

Betapapun hebatnya suatu rencana kebijakan atau program tetapi apabila itu tidak

direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia. Implementasi kebijakan membutuhkan para pelaksana kebijakan yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi kebijakan sering dipakai sebagai ajang melayani kepentingan kelompok tertentu, pribadi bahkan kepentingan partai. Bahkan implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu kegiatan yang sayarat dengan muatan politik dimana mereka yang memiliki kepentingan sedapat mungkin berusaha untuk mempengaruhinya. Pemahaman implementasi yang baik jangan hanya menyoroti lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program berikut pelaksanaannya terhadap kelompok sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung yang berpengaruh terhadap perilaku yang terlibat dalam program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut (Wahab, 2008:184-185).

Berdasarkan perumusan pendahuluan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang**". Motivasi peneliti untuk memilih judul penelitian ini adalah saat ini program ini sedang giat diimplementasikan oleh pemerintah Kota Kupang sebagai program prioritas pemerintah sehingga perlu diketahui sejauh mana keberhasilan kebijakan ini saat diimplementasikan di lapangan sehingga hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan ataupun rujukan bagi keberhasilan

program untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta berdampak bagi pembangunan Kota Kupang yang lebih baik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Kebijakan Publik**

Kebijakan dan kebijaksanaan negara sering disebut juga dengan kebijakan publik, kebijakan Negara atau kebijaksanaan pemerintah sebenarnya memiliki arti yang sama. Friedrich 1969 (dalam Agustino, 2016:16) menyatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, pemerintah atau suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dari kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Pengertian kebijakan lainnya dikemukakan oleh Nugroho (2006:23) membuat rumusan pemahaman tentang kebijakan publik. Pertama, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administrator negara atau administrator publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik bukan kehidupan seorang atau perorang. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrator publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah dari seluruh masyarakat di daerah itu. Ketiga, dikatakan sebagai kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih

banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya.

Makna kebijakan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan ditambahkan oleh Friedrich 1969 dalam Agustino (2016:16) mendefenisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan sehingga tercapainya sebuah tujuan.

Selanjutnya, Islamy (2004:33-34) mengartikan kebijaksanaan negara sebagai apa yang dinyatakan dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijaksanaan negara itu merupakan sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Easton memberikan arti kebijaksanaan Negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. Pengertian kebijaksanaan negara tersebut mempunyai implikasi sebagai berikut:

1. bahwa kebijaksanaan negara tersebut dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
2. bahwa kebijaksanaan negara tersebut tidak hanya cukup dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
3. bahwa kebijaksanaan negara baik itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
4. bahwa kebijaksanaan negara itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat (Islamy, 2004:18).

Menurut William Dunn (2003:25) menjelaskan bahwa dalam proses penyusunan kebijakan publik didasarkan pada berbagai tahapan utama.

Proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi membagi proses-proses tersebut kedalam beberapa tahap seperti apa yang dicontohkan diatas. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda dengan urutan gambar diatas. Misalnya tahap penilaian kebijakan seperti yang tecantum diatas bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Sebab ada ahli yang mencantumkan satu tahap lagi, yakni perubahan dan terminasi atau penghentian kebijakan.

Dari beberapa uraian tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks. Namun tanpa bermaksud mengurangi kekompleksan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses kebijakan (*decision and action*) yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan yang dikenal dari bahasa Inggris “*empowerment*”, adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat, terutama Eropa, secara harafiah pemberdayaan berarti “*to give power or authority to act*” yang artinya sebagai

memberikan kekuasaan atau mengalihkan kekuatan dan “*to give ability to or enable*” yang diartikan sebagai suatu upaya untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan. Sejalan dengan hal tersebut diatas maka berikut ini Prijono dan Pranaka, (1996:44-45) menyatakan bahwa:

Konsep pemberdayaan mungkin dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan aliran-aliran pada paruh kedua abad ke-20 yang dewasa ini banyak dikenal sebagai aliran *post modernisme*, dengan titik berat sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti sistem anti struktur dan anti determinisme yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan. Sedangkan Paul dalam buku restrukturisasi dan pemberdayaan organisasi (Sedarmayanti, 2000:78) menyatakan pula bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.

*Empowerment* atau pemberdayaan adalah suatu strategi atau merupakan paradigma pembangunan yang dilaksanakan dalam kegiatan pembangunan masyarakat khususnya di Negara-negara sedang berkembang. Pemberdayaan ini muncul oleh karena adanya kegagalan yang dialami dalam proses dan pelaksanaan pembangunan yang cenderung sentralistik seperti *community development* atau pengembangan komunitas. Model ini tidak memberikan kesempatan langsung kepada rakyat untuk terlibat dalam suatu proses pembangunan terutama dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan pejabat, perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan.

Dari perspektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan. Mitchell (1995:45) menjelaskan bahwa pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengotak-kotakan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan ambisinya. Ini berarti memperkenankan mereka untuk mnegembangkan suatu perasaan memiliki bagian-bagian dari proses, khususnya menjadi tanggung jawab mereka. Sementara dalam waktu yang sama menuntut mereka menerima suatu bagian tanggung jawab dan kepemilikan yang lebih luas dari keseluruhan proses. Selanjutnya Nisjar dalam (Sedarmayanti, 2000:80) menyatakan bahwa pemberdayaan organisasi dapat dilakukan melalui pendeklegasian wewenang (pemberian wewenang), sehingga diharapkan organisasi lebih fleksibel, efektif, inovatif dan kreatif, etos kerja tinggi yang pada akhirnya produktivitas organisasi menjadi meningkat. Cook dan Macaulay (1996:2) menyatakan bahwa *empowerment* merupakan perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk dapat meraih tujuan organisasi. Seperti yang telah disebutkan di atas, pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata “*empowerment*” yaitu sebagai suatu upaya untuk mengaktualisasikan semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Kartasasmita (1996:3) menyatakan bahwa

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial sehingga dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan persediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti

mengisolasi atau menutupi diri dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksplorasi yang kuat atas yang lemah.

Menurut Parson yang dikutip oleh Hikmat (2004:2) menyatakan bahwa konsep *power* dalam masyarakat adalah variabel jumlah. Menurut perspektif tersebut, *power* masyarakat adalah kekuatan anggota masyarakat secara keseluruhan yang disebut tujuan kolektif. Logikanya, pemberdayaan masyarakat miskin dapat tercapai bila ditunjang oleh struktur sosial yang tidak berpengaruh negative terhadap kekuasaan (*powerful*). Dengan pengertian lain, kelompok miskin dapat diberdayakan melalui ilmu pengetahuan dan kemandirian sehingga dapat berperan sebagai agen pembangunan.

Lebih lanjut, Hikmat (2004:4) menjelaskan bahwa konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Pertisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Sebaiknya orang-orang harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnya dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang dimiliki seseorang semakin baik pula kemampuan berpartisipasinya.

Wahyono *et al* (2001:8) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat menekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (*self reliant communities*) sebagai sebuah sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan demikian diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia (*people centered development*) ini kemudian melandasi wawasan pengelolaan sumber daya local (*community based resource development*) yang merupakan mekanisme perencanaan *people centered development* yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial (*social learning*) dan strategi perumusan program. Apapun tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan kemampuan yang dimilikinya (*empowerment*).

Dalam perkembangannya, pemberdayaan sebagai suatu paradigma atau strategi pembangunan mengalami pembiasan dalam aplikasinya, Kartasasmita (1996:8) mengidentifikasi 5 hal, yaitu:

1. Adanya kecenderungan untuk berpikir bahwa dimensi rasional dan pembangunan lebih penting dari pembangunan moralnya. Dimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya dan dimensi ekonomi lebih penting daripada dimensi sosialnya.
2. Anggapan bahwa pendekatan pembangunan yang bersal dari atas lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (*grass root*) akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif

- karena kurang mempertimbangkan kondisi nyata yang hidup di masyarakat.
- 3. Bawa pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan material daripada keterampilan dan menajerial.
  - 4. Anggapan bahwa lembaga-lembaga yang ada telah berkembang di kalangan masyarakat cenderung tidak efisien dan kurang efektif, bahkan menghambat proses pembangunan sehingga tidak perlu diikutsertakan.
  - 5. Bawa masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang diperlukan atau bagaimana memperbaiki nasibnya. Oleh karena itu mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun menyangkut dirinya sendiri.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa strategi pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan memandirikan serta menswadayaan masyarakat sesuai dengan potensi dan budaya local yang dimilikinya secara utuh dan komprehensif agar harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kondisinya tidak mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi pranata hidup yang ada dalam masyarakat perlu diberdayakan. Melalui strategi pemberdayaan ini, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat. Dengan demikian, lingkup pemberdayaan tidak hanya peningkatan kapasitas individual, tetapi juga kelompok serta institusi yang ada dan tumbuh dalam

masyarakat tersebut. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*chancy*).

Masyarakat yang sedang diberdayakan pada umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu pendamping diperlukan untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendampingan dalam konsep pemberdayaan sangat esensial dan fungsinya adalah menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator atau dinamisator serta membantu mencari cara pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

#### c. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Secara umum, ruang lingkup penelitian terdahulu yang diangkat calon peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu tentang pemberdayaan namun dengan lokus penelitian yang berbeda dimana peneliti memilih lokus penelitian di Kota Kupang. Penelitian menarik karena lokasi penelitian ini adalah ibukota propinsi yang sekarang sedang berkembang pesat dengan pembangunan ekonominya sedangkan program ini sedang sangat giat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kupang sebagai salah satu kebijakan prioritas unggulan di Kota Kupang sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu tentang

sejauh manakah keberhasilan kebijakan ini dalam pelaksanaannya.

Sebagai perbandingan, maka hasil temuan dari penelitian terdahulu seperti yang telah disebutkan sebelumnya akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Rino Adiwibowo (2014) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dinas Perikanan dan Kelautan mengimplementasikan Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Hambatan yang dihadapinya. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Organisasi dan kelembagaan PEMD di Kabupaten Indramayu melibatkan beberapa pihak didalamnya, yaitu : pemerintah daerah, dinas perikanan dan kelautan, dinas kehutanan, kalangan akademisi dan kelompok masyarakat. Sedangkan untuk penafsiran aparatur mengenai kebijakan PEMD ini dinilai sudah cukup baik. Penafsiran aparatur tersebut dikatakan baik, dilihat dari program kerja yang ada di internal instansi yang tersusun sesuai dengan perencanaan yang ada, sehingga dalam melaksanakan program pun sesuai dengan kebijakan internal yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir secara terpadu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota

Kupang, sedangkan kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

2. Larrisa Jennings (2014) Do Men Need Empowering too? A Systematic Review of Entrepreneurial Education and Microenterprise Development On Health Disparities Among Inner City Black Male Youth. Penelitian ini dilakukan di Amerika Serikat untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan ekonomi melalui wirausaha dan usaha mikro pembangunan untuk mengurangi kesenjangan berbasis kemiskinan dalam pengembangan negara khususnya pria Afrika-Amerika. Namun, sedikit yang diketahui mengenai dampak pendekatan serupa pada populasi Amerika Serikat yang kurang beruntung, khususnya remaja pria Afrika-Amerika di dalam kota secara tidak proporsional terpengaruh oleh kemiskinan, pengangguran, dan hasil kesehatan yang merugikan. Sebuah tinjauan literatur sistematis dilakukan untuk memandu pemrograman dan penelitian ini. Studi yang memenuhi syarat adalah yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 mengevaluasi inisiatif wirausaha dan mikroenterprise yang menargetkan pemuda dalam kota, berusia 15 sampai 24, dan yang tidak mengecualikan peserta laki-laki. Publikasi yang diulas oleh rekan sejawat diidentifikasi dari dua database bibliografi elektronik. Antara 26 makalah diambil untuk diperiksa, enam memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis. Tak satu pun dari 16

percobaan microenterprise yang terdaftar sedang dilakukan di antara populasi yang kurang beruntung di AS. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa kewirausahaan dan program microenterprise dapat memberi dampak positif pada ekonomi dan psikososial kaum muda berfungsi dan menghasilkan keputusan yang lebih sehat. Pria kulit hitam muda secara khusus diuntungkan dari peningkatan otonomi, keterlibatan, dan penghindaran risiko. Namun, program semacam itu sangat kurang dimanfaatkan di antara pemuda minoritas AS. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, metode penelitian dimana penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta tori yang digunakan khususnya teori kebijakan publik.

3. Kartika Sary (2015) dengan judul penelitian Implementasi Program Usaha Ekonomi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi dan faktor-faktor penghambat program usaha ekonomi desa di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Bahwa proses implementasi kebijakan Program Pemberdayaan Desa UED-SP di Desa Teluk Latak telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat program berjalan sesuai dengan JUKNIS (petunjuk teknis) yaitu, dengan telah bergulirnya dana pinjaman dan pengembalian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, walaupun masih ada beberapa orang mengalami keterlambatan dalam melunasi pinjaman. Kemudian adanya pertanggungjawaban kegiatan UED-SP dengan dibuatnya laporan bulanan dan akhir tahun yang dipertanggungjawabkan pada musyawarah desa. Pencapaian Tujuan Kebijakan dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan program pemberdayaan desa UED-SP di atas, yaitu adanya peningkatan dorongan berusaha masyarakat desa, pengembangan usaha masyarakat dan penyerapan tenaga kerja, kemudian meningkatnya peran wanita dalam kegiatan perekonomian desa, akan tetapi kemampuan kemasyarakatan dalam pengelolaan dana usaha desa tidak mengalami peningkatan yang berarti. Maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan program pemberdayaan desa UED-SP belum berjalan secara optimal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, sedangkan kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kebijakan yang berbasis kepada penguatan ekonomi masyarakat.
4. Muhamad Shakil Ahmad dan Noraini Bt. Abu Talib (2015) dengan judul penelitian Empowering Local Communities: Decentralization. Empowerment and community driven development. Penelitian ini dilakukan di Pakistan mengenai wacana Tata Pemerintahan dan Pembangunan untuk merangkul partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sebagai sarana dasar pembangunan kapasitas lokal untuk meningkatkan kualitas hidup,

pengurangan kemiskinan, pembangunan dan berubah di tingkat lokal. Penelitian ini mengilustrasikan peninjauan kembali inisiatif desentralisasi lokal sistem pemerintah setelah pengumuman rencana devolusi di Pakistan dan menilainya. Penelitian ini menggunakan metode partisipatif untuk memastikan sejauh mana mereka telah memperbaiki proses pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Penelitian ini juga mengukur dampak pemberdayaan masyarakat tentang keberlanjutan proyek berbasis masyarakat yang dilaksanakan di bawah inisiatif desentralisasi melalui organisasi berbasis masyarakat yang disebut Community Community Board's (CCB's). Hasilnya mengakui perkembangan manusia dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan proyek di tingkat lokal namun juga rasa masyarakat dan manfaat bersama diterjemahkan untuk masyarakat pedesaan. Tujuan mendasar desentralisasi tampaknya sulit dipahami karena hanya kekuatan yang dipindahkan ke tingkat lokal, dimana kurang mendapat dukungan peningkatan kapasitas masyarakat, akses masyarakat terhadap sumber daya, masih ada pemilikan elit atas proses pemilihan. Dikatakan bahwa inisiatif pengembangan masyarakat di Pakistan memerlukan dukungan terus menerus dari pemerintah daerah untuk meningkatkan ekonomi pedesaan setempat. Juga, strategi pengembangan partisipatif masyarakat-pemerintah daerah dapat mencapai lokal yang kuat kepemilikan dan pemberdayaan di antara masyarakat pedesaan. Perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, metode penelitian dimana penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta teori yang digunakan khususnya teori kebijakan publik sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang empowerment atau pemberdayaan.

5. Mudir (2016) dengan judul penelitian Implementasi Program Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa salo palai, dan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambatnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Salo Palai tidak berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan karena interaksi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat terkadang mengalami diskomunikasi sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam melaksanakan program kebijakan, selain itu isi kebijakan atau target group kurang sesuai dengan harapan masyarakat dikarenakan pemerintah hanya memfokuskan pembangunan di bidang pemberdayaan lingkungan fisik sehingga program pemberdayaan perekonomian dan sumber daya manusia sangat minim, sehingga masyarakat tidak bisa mengembangkan perekonomian di desa. Faktor

- penghambat dalam proses implementasi program Alokasi Dana Desa adalah terletak pada kurangnya pemahaman tentang tugas dan fungsi baik dari aparatur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, Rukun Tetangga dan masyarakat secara umum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, sedangkan kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kebijakan yang berbasis kepada penguatan ekonomi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat.
6. Denyse Mello dan Mariane Schmick (2017) dengan judul penelitian Women's economic empowerment and the potential for more sustainable land use practices. Penelitian ini berfokus pada efek pada pemberdayaan perempuan pedesaan terhadap partisipasi dalam usaha mikro, akses dan pengambilan keputusan untuk penggunaan lahan, serta perubahan dalam praktik pengelolaan sumber daya mereka. Kami mengeksplorasi efek yang sangat spesifik dari pemberdayaan perempuan terhadap upaya untuk menerapkan penghidupan yang lebih berkelanjutan praktik oleh perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan usaha mikro. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merancang, melakukan wawancara semi terstruktur dengan 65 peserta perempuan pedesaan yang terdiri dari sebelas kolektif usaha mikro di negara bagian Amazon, Pará and Acre, Brazil. Hasilnya menunjukkan bahwa ekonomi perempuan Pemberdayaan memberi kontribusi pada kemampuan mereka memperkuat tata kelola adaptif di rumah tangga karena perbaikan kesadaran mereka akan isu dan praktik lingkungan yang digunakan untuk mengelola sumber daya hutan; dan akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan tentang penggunaan lahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, metode penelitian dimana penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta tori yang digunakan khususnya teori kebijakan publik sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang empowerment atau pemberdayaan namun penelitian ini lebih khusus kepada pemberdayaan perempuan.
7. Fadel Machmud (2017) dengan judul penelitian Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sangihe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dinas kelautan dan perikanan kabupaten kepulauan sangihe. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
- a. Komunikasi, antara pihak membuat kebijakan atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan pelaksana kebijakan atau Staf yang ada di dalamnya, belum terjalin komunikasi yang baik sehingga masih terjadi kendala dalam pelaksanaan program

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- b. Sumberdaya, staf-staf yang ada dalam Dinas Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya memadai karena dengan keterbatasan dan kurangnya sumberdaya yang ada. Kemudian juga dengan tidak konsistennya dalam bekerja sehingga terdapat masalah pada implementasi kebijakan
  - c. Disposisi, atau sikap yang nampak dari pembuat kebijakan terhadap masyarakat yang cukup baik sesuai dengan apa yang di rasakan masyarakat, sikap yang loyal, tanggung jawab, dan penuh perhatian terhadap masyarakat sehingga tidak dapat dikatakan ada masalah pada kebijakannya.
  - d. Struktur Birokrasi, birokrasi yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan ini masih belum berjalan dengan baik di karenakan masih ada oknum oknum yang tidak bekerja sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, sedangkan kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang kebijakan yang berbasis kepada penguatan ekonomi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat.
- 8. Noor Adwa Sulaiman dan Rusnah Muhamad (2017) dengan judul penelitian Empowering The Society Through Companies CSR Agenda.
- Penelitian ini berusaha untuk memperluas pengetahuan tentang pemberdayaan dalam domain CSR di negara Malaysia. Secara kritis definisi, konsep dan ukuran pemberdayaan yang relevan agenda CSR Kajian literatur mengungkapkan bahwa ruang lingkup konseptualisasi Pemberdayaan dalam agenda CSR perusahaan dapat didiskusikan secara psikologis perspektif individu dalam masyarakat. Ke depan, data empiris bisa dikumpulkan melalui kuesioner untuk menguji keabsahan instrumen. Topik masalah sosio ekonomi adalah salah satu yang paling banyak dibahas secara global karena memberi efek pada pendudukan, pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan tempat tinggal tempat tinggal individu. Tantangan sosial ini harus ditangani dan terselesaikan karena untuk meningkatkan kontribusi individu terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat mereka dan mengurangi ketegangan sosial dan konflik itu berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi negara. Untuk alasan ini, di Kesebelas Rencana Malaysia (2016-2020), Pemerintah Malaysia menekankan tentang pentingnya partisipasi perusahaan dalam memberdayakan masyarakat memperbaiki sosio ekonomi yang bisa mendukung masyarakat yang adil. Itu Program pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, kualitas hidup dan kesejahteraan individu dan kelompok di masyarakat melalui pengurangan kekayaan kesenjangan, ketidakseimbangan rasial dan meningkatkan kesetaraan kerja. Salah satu cara Mengawali keterlibatan lebih

besar dari perusahaan dalam sosio ekonomi Perkembangan masyarakat adalah melalui agenda CSR. Secara khusus, CSR agenda melalui kegiatan pemberdayaan (seperti program pelatihan, program bimbingan sponsor pendidikan dan pembelajaran dan program pembangunan) diyakini memiliki implikasi positif masyarakat dengan cara meningkatkan kekayaan, pendidikan dan keterampilan individu. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengembangkan pengukuran pemberdayaan di agenda CSR perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, metode penelitian dimana penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta tori yang digunakan khususnya teori kebijakan publik sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang empowerment atau pemberdayaan.

9. Abdul Wahida, Muhammad Shakil Ahmada, Noraini Bt. Abu Talibb, Iqtidar Ali Shahc, Muhammad Tahird, Farzand Ali Jana, Muhammad Qaiser Saleeme (2017) dengan judul penelitian Barriers to empowerment: Assessment of community-led local development organizations in Pakistan. Penelitian ini pada awalnya menggambarkan konsep pemberdayaan dan pentingnya, dan kemudian menggambarkan temuan penilaian proyek terhadap pemberdayaan di antara Dewan Komunitas di Pakistan. Pembangunan berbasis masyarakat lokal dan mekanisme pembangunan berbasis

masyarakat diadopsi oleh banyak negara berkembang dan maju, yang ditujukan untuk memperbaiki struktur ekonomi, partisipasi dan kualitas hidup bersama dengan kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Tulisannya tentang peran dan tingkat keparahan hambatan yang berbeda yang mencegah pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pengembangan komunitas yang dipimpin di Pakistan. Wawancara dengan rekaman audio, terstruktur dan terbuka dilakukan dengan enam pemimpin Dewan Masyarakat Pakistan yang memulai dan menerapkan proyek berbasis masyarakat. Diskusi dengan responden mengenai mekanisme partisipasi masyarakat, kontrol politik dan elit, masalah yang dihadapi di tingkat masyarakat karena kontrol elit dan isu-isu lain dalam pengembangan kapasitas dan akses untuk informasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa campur tangan politik dan kontrol elit menghalangi masyarakat partisipasi di tingkat lokal. Ini merupakan kendala yang menghambat partisipasi masyarakat dan kegiatan pengembangan masyarakat di daerah. Membangun kapasitas di tingkat lokal merupakan unsur penting untuk pembangunan berkelanjutan, karena tidak hanya memberi kesempatan kepada pemangku kepentingan lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga memungkinkan “kepemilikan masyarakat”, komponen kunci pemberdayaan. Temuan penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih besar tentang isu-isu pembangunan di tingkat lokal dan akan

membantu para pembuat kebijakan fokus pada isu dan masalah yang disorot yang dihadapi oleh organisasi pembangunan yang dipimpin oleh masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, metode penelitian dimana penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta tori yang digunakan khususnya teori kebijakan publik sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang empowerment atau pemberdayaan.

10. Lindsay Stark, Dr.P.H., Ilana Seff, M.P.H, Asham Assezenew, M.A, Jennate Eoomkham, Kathryn Falb, Sc.D, Fred M. Ssewamala, Ph.D., M.S.W (2017) dengan judul penelitian Effects of a Social Empowerment Intervention on Economic Vulnerability for Adolescent Refugee Girls in Ethiopia. Penelitian ini membahas dampak program pemberdayaan sosial anak perempuan, menciptakan Peluang melalui mentoring, keterlibatan orang tua dan ruang aman pada kerentanan ekonomi dari remaja pengungsi yang ada di Ethiopia. Remaja yang berusia 13-19 tahun dari tiga kamp pengungsian secara acak diberi perlakuan ( $n \frac{1}{4} 457$ ) atau kontrol ( $n \frac{1}{4} 462$ ). Peserta dalam kondisi perawatan menerima 40 kurikulum tetap, setiap sesi yang difasilitasi oleh mentor seminggu sekali dalam kurun waktu 10 bulan, sedangkan mereka yang berada dalam kondisi terkontrol tidak terpapar kurikulum. Perawat anak perempuan di kelompok perlakuan juga berpartisipasi

dalam 10 sesi diskusi yang diadakan sebulan periode sekali, di mana mereka belajar tentang isu-isu yang relevan dengan kesejahteraan dan kesehatan anak remaja. Data dikumpulkan dari remaja putri pada awal dan sekitar 10 bulan setelah intervensi inisiasi. Dengan menggunakan pemodelan regresi logistik, kami menemukan bahwa, setelah intervensi, anak perempuan di kelompok perlakuan tidak lebih mungkin tidak berada di kelompok kontrol untuk bersekolah, bekerja untuk gaji, bekerja untuk gaji sementara tidak terdaftar di sekolah, atau terlibat dalam eksplorasi seksual transaksional. Temuan menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial tidak dapat mengurangi kerentanan ekonomi bagi remaja putri tanpa secara bersamaan menerapkan program pemberdayaan ekonomi atau mengambil tindakan tambahan untuk mengatasi rintangan struktural yang lebih luas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian dimana peneliti akan melakukan penelitian di Kota Kupang, metode penelitian dimana penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta tori yang digunakan khususnya teori kebijakan publik sedangkan untuk persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang empowerment atau pemberdayaan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif

adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nasir, 2005:54).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2012:8).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sumber sekunder dan mengacu kepada teknik pengumpulan data dari Creswell (2016:254-255) yaitu berasal dari hasil wawancara kualitatif, penelusuran dokumen-dokumen kualitatif, observasi kualitatif dan materi audio dan visual kualitatif di Kelurahan Sikumana Kota Kupang dan di Bappeda Kota Kupang. Data yang terkumpul selama proses penelitian selanjutnya akan dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menampilkan atau memaparkan secara jelas mengenai kondisi realita yang terjadi di lokasi penelitian dengan mengacu kepada teknik analisis data dari Creswell (2016:264-268) yaitu; mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, memabaca keseluruhan data, coding, terapkan proses coding, menyajikan data dalam narasi/laporan kualitatif dan pembuatan interpretasi data. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 45 orang dengan rincian sebagai berikut; Ketua Bappeda Kota Kupang, Lurah Sikumana Kota Kupang, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang dan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang sebagai penerima manfaat kebijakan ini.

Distribusi sampel dalam penelitian ini akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi Data Sampel Yang Diteliti**

No.	Informen	Populasi	Sampel
1.	Ketua Bappeda Kota Kupang	1 Orang	1 Orang
2.	Lurah Sikumana Kota Kupang	1 Orang	1 Orang
3.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang	4 Orang	4 Orang
4.	Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang	46 Orang	39 Orang
<b>Jumlah</b>		52 Orang	45 Orang

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasi penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu prioritas pemerintah Kota Kupang juga memiliki sisi negatif dalam implementasinya. Temuan tersebut akan dibahas sebagai berikut:

### **a. Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang**

Kebijakan ini dimulai sejak tahun 2013 di Kelurahan Sikumana Kota Kupang. Hingga tahun 2020 masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan yang mandaftarkan diri sebagai penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat jumlahnya cenderung fluktuatif dengan berbagai profesi yang berbeda-beda, namun pada tahap validasi data penulis menemukan bahwa data mengenai jumlah masyarakat penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang tahun 2019 tidak akurat berdasarkan sudut pandang peneliti, penulis menyatakan hal ini karena jumlah penerima dana berdasarkan data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang berjumlah 46 orang tetapi saat penulis menemukan fakta bahwa jumlah masyarakat penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat hanya berjumlah 39 orang, 7 orang masyarakat tidak memiliki nama dan alamat yang jelas.

Penyaluran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000-Rp. 25.000.000 disetor ke rekening penerima sedangkan dibawah Rp. 5.000.000 diserahkan secara tunai. Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa proporsi dana penerima bantuan antara Rp. 1.000.000 sampai dengan 25.000.000. Realisasi dana pemberdayaan ekonomi

masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang adalah sebesar Rp. 500.000.000, dari 46 orang berdasarkan data Kelurahan Sikumana Kota Kupang dan 39 orang yang penulis temui, diketahui bahwa jumlah penunggak dana pemberdayaan ekonomi masyarakat sebesar 26 orang dengan jumlah tunggakan Rp. 310.308.000. Jenis usaha yang dipilih adalah berdasarkan pada inisiatif sendiri, kemampuan yang dimiliki dan dirasa mudah untuk dikerjakan oleh masyarakat sehingga dapat mengurus usahanya dengan baik. Dari 39 orang masyarakat penerima dana 3 orang menyewa tempat usaha dan lainnya memiliki tempat usaha sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya lebih utnuk menyewa tempat usaha tetapi pada umumnya lokasi usaha masyarakat bukanlah lokasi yang stregis dimana masyarakat menggunakan pekarangan dan tempat tinggal sebagai lokasi usaha sehingga menyebabkan masyarakat sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Waktu untuk berusaha cenderung sesuai dengan situasi sekitar tempat usaha, beberapa masyarakat berjualan pada siang dan malam hari, beberapa pada pagi hari seperti penjual sayur menjual dagangannya pada pagi dan malam hari, penjual ikan cenderung pada malam hari, penjual kue pada pagi hari dan kios serta tambal ban pada pagi hingga pukul 23.00.

Jika merujuk kepada kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang maka yang menjadi sasaran dalam kebijakan ini adalah masyarakat yang memiliki usaha perseorangan namun dalam

implementasinya di Kelurahan Sikumana Kota Kupang ditemukan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang terkesan memilih-milih sasaran yang akan ditetapkan sebagai penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan faktor kekeluargaan sebagai standar untuk menetapkan penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis dapat menyatakan penyebab hal ini terjadi dikarenakan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang mengenai pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diharuskan adalah warga kelurahan setempat sehingga menimbulkan kecenderungan untuk mementingkan kepentingan keluarga di sekitarnya terlebih dahulu dan setelah itu kepentingan orang lain kekuasaan yang besar kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lurah dalam mengelola dana ini juga menjadi salah satu alasan penetapan sasaran kebijakan hanya berdasar pada hubungan kekeluargaan, jumlah sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang juga tidak sesuai antara laporan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang dengan jumlah nyata di lapangan jumlah sasaran kebijakan berdasarkan data Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 46 orang tetapi fakta di lapangan diketahui hanya berjumlah 39 orang sedangkan standar kebijakan ini yaitu penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif dengan memberikan bantuan dana dalam bentuk hibah kepada masyarakat juga belum mampu menguatkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat dikarenakan mayoritas penerima dana kebijakan ini belum mampu mengembalikan dana ini tepat waktu hal ini dibuktikan dengan jumlah tunggakan dana kebijakan ini yang cukup besar yaitu Rp.310.308.000 sehingga menyebabkan tersendatnya proses perguliran kembali dana ini, untuk diketahui syarat dana kebijakan ini dapat digulirkan kembali berdasarkan pada Keputusan Walikota Kupang Nomor 112D/KEP/HK/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kota Kupang adalah perguliran dapat dilaksanakan apabila pengembalian cicilan kepada kas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat telah mencapai 25% dari pagu anggaran dana pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk kelurahan bersangkutan, jumlah dana kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang berjumlah Rp.500.000.000 maka pagu anggarannya adalah Rp.125.000.000. Daftar jumlah penunggak dana kebijakan ini akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Masyarakat Penunggak Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tahun 2019

No.	Jumlah Penerima	Lunas	Penunggak
1.	39 Orang	13 Orang	26 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.189.692.000</b>	<b>Rp.310.308.000</b>
			<b>Rp. 500.000.000</b>

Sumber: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang 2020

Berdasarkan tabel tersebut, dari 39 orang masyarakat penerima dana diketahui 26 orang masih menunggak, alasan para penunggak dana kebijakan ini belum mampu menguatkan dan mengembangkan usaha mereka adalah karena faktor iklim, lokasi tempat usaha dan jangka waktu pengembalian dana yang terlalu singkat yaitu hanya 3 bulan sehingga berdampak pada pengembalian dana yang tersendat sedangkan untuk 17 orang yang telah melunasi dana ini menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu mereka dalam menguatkan dan mengembangkan

usaha ekonomi produktif mereka sesuai dengan tujuan kebijakan ini bahkan terdapat 3 orang yang telah meminjam dana ini kedua kalinya.

Untuk dana atau insentif dalam pengalokasiannya sejak tahun 2013 mengalami peningkatan agar masyarakat dapat meminjam dengan jumlah yang lebih besar kepada Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jumlah insentif kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Dana Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang

No.	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Penerima Manfaat	Jumlah Pengembalian Dana (Rp)	Dana Tertunggak	Penunggak
1.	2015	250.000.000	134 Orang	243.700.000	-	-
2.	2016	250.000.000	22 Orang	149.200.000	-	-
3.	2017	500.000.000	59 Orang	341.370.000	-	-
4.	2018	500.000.000	52 Orang	412.520.000	-	-
5.	2019	500.000.000	46 Orang	189.692.000	310.308.000	26 Orang

Sumber: Kelurahan Sikumana Kota Kupang, 2020

Pada tabel tersebut di atas diketahui bahwa sumber daya kebijakan berupa dana atau insentif kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang meningkat sejak tahun 2013 saat kebijakan ini mulai diimplementasikan, di tahun yang sama jumlah insentif kebijakan ini adalah Rp.250.000.000 dan terus naik hingga pada tahun 2019 alokasi dana kebijakan ini berjumlah Rp.500.000.000 Kenaikan alokasi dana ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang yang dapat meminjam dan

mengusahakan dana ini dengan jumlah yang lebih besar sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya namun pada akhirnya insentif ini terkendala pada jumlah pengembalian dana yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Kupang sedangkan insentif berupa suntikan dana kebijakan ini sedang direncanakan untuk dinaikkan jumlahnya menjadi 1 miliar.

Permasalahan lainnya dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Kupang adalah karakteristik agen pelaksana kebijakan yaitu kompetensi dari

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dimana dalam implementasinya penulis menemukan fakta bahwa terdapat kesalahan verifikasi dan reverifikasi dari penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu beberapa penerima dana kebijakan ini adalah pegawai negeri sipil aktif dan tidak kekurangan dalam hal modal usaha sehingga tidak sesuai dengan sasaran kebijakan ini serta pencatatan administrasi yang tidak tertib sehingga terdapat beberapa nama penerima yang fiktif, pada tahun 2017 jumlah penerima fiktif ini adalah 7 orang, dikatakan fiktif karena penerima tersebut tidak tercatat secara jelas dalam data penerima dana pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Temuan lainnya dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana Kota Kupang dalam implementasinya terdapat kondisi sosial berupa iklim di Kota Kupang hanya mengenal dua musim saja yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kota Kupang memiliki musim kemarau lebih panjang daripada musim penghujan dan pada masa peralihan musim akan terjadi angin badai. Pada bulan Maret sampai dengan Oktober arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember - Februari arus angin yang datang dari benua Asia dan Samudera Pasifik banyak mengandung uap air sehingga terjadi musim hujan. Suhu dan Kelembaban Udara Rata-rata suhu udara di Kota Kupang berada pada kisaran  $22,30^{\circ}$  -  $33,50^{\circ}\text{C}$ , temperatur tertinggi sekitar  $33,50^{\circ}\text{C}$  terjadi pada bulan September dan suhu udara minimum  $22,30^{\circ}\text{ C}$  pada bulan Agustus. Kelembaban udara rata-rata Kota Kupang dan sekitarnya adalah sekitar 83,25%

dengan variasi 73 % hingga 99 %. Kelembaban udara yang sedemikian ini dipengaruhi oleh lamanya penyinaran matahari. Lama penyinaran matahari rata-rata mencapai 9,5 jam perhari.

Kondisi iklim ini turut berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan, hubungan kondisi iklim di Kota Kupang dengan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Sikumana ini yaitu terdapat beberapa pedagang menyatakan bahwa pada musim peralihan dari musim panas ke musim hujan biasanya terjadi badai maka para peternak ayam ini harus memiliki modal lebih untuk menjaga usahanya tetap berjalan dengan memberi vaksin lebih banyak dari biasanya agar terhindar dari penyakit dan kerugian selain itu beberapa penjual ikan yang penulis wawancara menyatakan apabila musim angin barat/angin badai maka harga ikan dari kapal-kapal penangkap ikan akan cenderung naik, harga ikan yang naik tersebut berimbang kepada usaha mereka dikarenakan ikan menjadi tidak laku dijual.

## PENUTUP

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai salah satu prioritas pemerintah Kota Kupang juga memiliki sisi negatif dalam implementasinya, diketahui bahwa Kelurahan Sikumana Kota Kupang adalah salah satu dari 10 kelurahan di Kota Kupang yang mendapat rapor merah dari pemerintah Kota Kupang, hal ini disebabkan karena Kelurahan Sikumana Kota Kupang menjadi penunggak dana terbesar saat ini dengan jumlah dana tunggakan sebesar Rp. 310.308.000 dari total dana Rp. 500 juta yang dihibahkan, pengembalian dana bergulir program ini oleh masyarakat penerima bantuan

sering terjadi keterlambatan, masyarakat beralasan bahwa program ini membantu masyarakat dalam hal dana tetapi waktu pengembalian dana yang hanya satu tahun dirasa terlalu singkat yang akibatnya masyarakat meminjam kepada bank atau koperasi untuk pengembalian dana tersebut seperti menggali lubang untuk menutup lubang hal ini dikarenakan beberapa masyarakat memiliki usaha yang tidak bisa berjalan normal pada musim-musim tertentu seperti nelayan, penjual ikan, penjual kayu api dan arang, dana yang diberikan dirasa belum dirasa mencukupi karena dana yang diberikan belum sesuai dengan besaran usaha yang diusahakan oleh masyarakat, masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat karena kurangnya sosialisasi, tidak semua masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah

menerima dana program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kurangnya pengawasan oleh lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga terjadi banyak kesalahan dalam perekutan calon penerima bantuan, total penerima dana PEM di kelurahan di sebanyak 46 warga, sementara warga yang belum mengembalikan dana tersebut sebanyak 26 orang dengan jumlah dananya adalah sebesar Rp. 310.308, kurangnya penyampaian informasi terhadap masyarakat mengenai program PEM, juga menjadi masalah tersendiri sehingga masyarakat sebagai kelompok sasaran kurang mengetahui secara lengkap mengenai program PEM itu sendiri, carut marutnya administrasi sehingga tidak diketahui secara pasti mengenai proses pengembalian dana oleh masyarakat, sumberdaya yang kurang, selain itu juga koordinasi yang kurang baik antara pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Lurah.

## **DAFTAR RUJUKAN**

### **Buku Referensi**

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta
- Cook Sarah dan Steve Macaulay. 1996. *Perfect Empowerment*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Hikmat, Harry, 2004, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung. Humaniora.
- Islamy, M. Irfan, 2004. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, Mimeo, disampaikan pada Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-Golkar), Jakarta, 7 November 1996.
- Kuncoro Mudrajat, 2003. *Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta (UPP) AMP YKPN.

- Mitchell, Terence R, 1995. *People in Organization Understanding Their Behaviour*. International Student Edition Mc. Graw Hill Kogakhusa. Ltd.
- Nasir. Moh, 2008. *Metode Penelitian*. Gahlia Indonesia. Jakarta
- Nugroho. Riant. D. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo
- Prijono S. Onny dan A.M.W. Pranaka (penyunting), 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta. CSIC
- Sedarmayanti, 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. CV Alfabeta.
- Surjono Agus Dr., MS dan Drs. Trilaksono Nugroho. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Wahab Abdul Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahyono, Ary dkk, 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Pressindo. Yogyakarta.

### **Jurnal**

- Adiwibowo Rino. 2014. *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Provinsi Jawa Barat)*. International Journal of Innovative. DOI: [10.24940/ijird/2017/v6/i6/JUN17056](https://doi.org/10.24940/ijird/2017/v6/i6/JUN17056).
- Ahmad Shakil Muhamad dan Noraini Bt. Abu Talib. 2015. *Empowering Local Communities: Decentralization. Empowerment and community driven development* . © Springer Science+Business Media Dordrecht 2015.
- Al-Dajani Haya, Marlow Susan, 2013. “*Empowerment and entrepreneurship: a theoretical framework*”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 19 Issue: 5, pp.503-524, <https://doi.org/10.1108/IJEBR-10-2011-0138>.
- Jennings Larrisa .2014. *Do Men Need Empowering too? A Systematic Review of Entrepreneurial Education and Microenterprise Development On Health Disparities*